

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA  
DESA, PERAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Kasus Desa Pagejungan Kabupaten Brebes)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1  
Program Studi Akuntansi**



**Disusun oleh :**

**Ardi Wirakusuma**

**31401900021**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, PERAN ORGANISASI  
PEMERINTAH DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi kasus desa Pagejungan Kabupaten Brebes)

Disusun Oleh :

Ardi Wirakusuma

NIM : 31401900021

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan sidang  
panitia ujian usulan penelitian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 13 Februari 2024

Penguji 1

Penguji 2



Dr. Sri Anik, S.E.,M.Si

Nik.210493033



Dedi Rusdi, S.E.,M.Si,Ak

Nik.211496006

Pembimbing,



Dr. Dista Amalia Arifah,

S.E.,M.Si.,Akt

Nik.211406020

Ketua Program Studi



Provita Wijayanti, SE., M.Si.,Ak.,CA

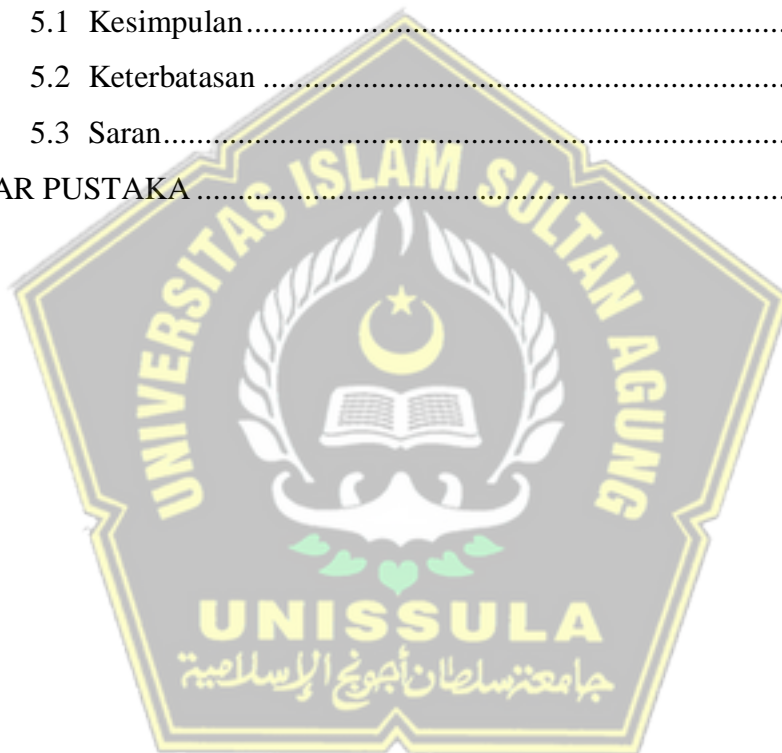
NIK.211403012

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	11
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Teori Stewardship .....	11
2.1.2 Pemerintah Desa .....	12
2.1.3 Alokasi Dana Desa (ADD) .....	13
2.1.4 Akuntabilitas .....	14
2.1.5 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa .....	15
2.1.6 Peran Organisasi Pemerintah Desa .....	16
2.1.7 Sistem Pengendalian Internal .....	16
2.2 Perumusan Hipotesis .....	19
2.3 Kerangka Penelitian .....	24
BAB III METODE PENELITIAN .....	25
3.1 Jenis Penelitian .....	25
3.2 Populasi dan Sampel .....	26
3.2.1 Populasi Penelitian .....	26
3.2.2 Sampel Penelitian .....	26
3.3 Sumber dan Jenis Data .....	26
3.3.1 Sumber Data Penelitian .....	26
3.3.2 Jenis Data .....	27
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	27

3.5	Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	27
3.6	Teknik Analisis Data.....	29
3.6.1	Uji Validitas dan Reabilitas .....	29
3.6.2	Statistik Deskriptif .....	30
3.6.3	Uji Asumsi Klasik .....	30
3.6.3.1	Uji Normalitas .....	31
3.6.3.2	Linearitas.....	31
3.6.3.3	Uji Multikolinearitas.....	31
3.6.3.4	Uji Heteroskedastisitas .....	32
3.6.4	Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	32
3.6.5	Uji Goodness of Fit.....	33
3.6.5.1	Uji Simultan (Uji F).....	33
3.6.5.2	Uji Koefisien Determinasi Simultan ( $R^2$ ) .....	33
3.6.5.3	Uji Hipotesis (Uji t).....	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian . <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
4.1.1	Karakteristik Data Responden..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
4.2	Hasil Penelitian.....	37
4.2.1	Uji Validitas dan Reabilitas .....	37
4.2.1.1	Uji Validitas .....	37
4.2.1.2	Uji Reliabilitas.....	39
4.2.2	Statistik Deskriptif..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
4.2.3	Uji Asumsi Klasik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.3.1	Uji Normalitas .....	40
4.2.3.2	Uji Multikolinearitas.....	41
4.2.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	42
4.2.3.4	Uji Analisis Regresi Liner Berganda.....	43
4.2.4	Uji Goodness of Fit .....	44
4.2.4.1	Uji Simultan (Uji F).....	44
4.2.4.2	Uji Koefisien Determinasi Simultan ( $R^2$ ) .....	45

4.2.4.3 Uji Hasil Uji Paraisal (Uji t) .....	46
4.3 Pembahasan .....	47
4.3.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	47
4.3.2 Pengaruh Peran Organisasi Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	49
4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Keterbatasan .....	53
5.3 Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>56</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang – undang (UU) Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sesuai dengan Undang-undang (UU) no.6 tahun 2014 tentang desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik. Pembangunan yang direncanakan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia.

Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang besar untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp 212 Triliun. Rincian dana sebagai berikut: pada tahun 2020 sebesar Rp70 Triliun, tahun 2021 sebesar Rp72 Triliun, dan tahun 2022 sebesar Rp70 Triliun. Dana desa

diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 6.000 desa, dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.450 desa pada tahun 2020. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah desa mandiri sebanyak 3.608 dari 73.709 atau 4,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 45,57%. (Kementerian Desa PDTT RI, 2018). Terdapat 30 kasus pada 20 desa terkait dana desa di Jawa Tengah pada periode Juni 2019 sampai Oktober 2020 diperiksa lebih khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada empat persoalan yang melatar belakangi terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan desa yaitu penyalahgunaan wewenang kepala desa, penggelapan dana, adanya surat pertanggung jawaban (SPJ) fiktif dan kualitas serta kuantitas pekerjaan fisik yang tidak sesuai aturan. Persoalan akhirnya berpotensi merugikan keuangan negara. Peran dana desa sangat penting untuk kemajuan desa, sehingga kepala desa harus mampu memaksimalkan dana desa yang ada, tentunya dengan membuat program yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat (semarang.bpk.go.id).

Bantuan dana desa di Kabupaten Brebes pada tahun 2018, sudah mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi masih sering ditemui kendala administrasi. Hal tersebut menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan kepada desa, melakukan monitoring dalam penggunaan dana desa, dan memberikan sanksi atas penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Setiap desa mempunyai kewajiban untuk tertib administratif dalam mempertanggungjawabkan



dana desa, dengan memahami aturan atau regulasi terkait pengelolaan dana desa. Pada tahun 2021 Kabupaten Brebes menerima dana desa sebesar Rp135.000.000.000 yang telah disalurkan ke 292 desa yang tersebar di 17 Kecamatan. Di bawah ini merupakan rincian dana desa per Kecamatan di Kabupaten Brebes tahun 2021:

**Tabel 1. 1 Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Brebes**

No	Kecamatan	Anggaran Dana Desa
1	Salem	Rp. 9.429.597.000
2	Bantarkawung	Rp. 8.465.032.000
3	Paguyangan	Rp. 5.764.613.000
4	Bumiayu	Rp. 6.915.960.000
5	Sirampog	Rp. 5.964.317.000
6	Tonjong	Rp. 6.431.363.000
7	Jatibarang	Rp. 9.800.996.000
8	Songgom	Rp. 4.670.653.000
9	Larangan	Rp. 5.473.323.000
10	Ketanggungan	Rp. 9.928.294.000
11	Banjarharjo	Rp. 11.412.860.000
12	Kersana	Rp. 5.855.183.000
13	Losari	Rp. 10.164.826.000
14	Tanjung	Rp. 8.286.964.000
15	Bulakamba	Rp. 8.936.410.000
16	Wanasari	Rp. 9.285.743.000
17	Brebes	RP. 8.213.866.000
	<b>Total</b>	<b>Rp. 135.000.000.000</b>

Kecamatan Brebes merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Brebes yang terdiri dari 18 desa, yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Hasil dari penelitian di salah satu desa yaitu desa Pagejungan menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pagejungan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan



terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya.

Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau di laksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal dilakukan secara preventif dan represif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang dikarenakan kemampuan berpartisipasi masyarakat yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah.

Proses pengelolaan dana desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Pengelolaan dana desa dituntut untuk memenuhi adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance), salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Akuntabilitas yang baik, akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga alokasi dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pembedayaan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, antara lain kompetensi aparatur desa. Kompetensi aparatur desa merupakan variabel penting dalam mengelola dana desa, oleh karena itu desa berkewajiban menyusun laporan keuangan yang digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban. Kompetensi

pemerintah desa ini dapat mencakup pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang.

Penelitian Nahuddin, Y.(2018) menyatakan bahwa semakin baik kompetensi aparat pengelola dana desa maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Friyani R (2017). Berbeda dengan penelitian Widyatama dan Novita (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dari pemerintah desa secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah peran organisasi pemerintah desa. Peran organisasi pemerintah desa menyelenggarakan pengembangan peranserta dan keswadayaan masyarakat, menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugas, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aulia. (2018) menyatakan bahwa peran organisasi yang bagus terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Semakin tinggi komitmen pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya dukungan dan perhatian dari pihak organisasi. Selain itu tugas yang

terlaksana dengan baik, belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi dan reward dari pihak pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap organisasi.

Faktor Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. SPIP (system pengendalian intern pemerintah) bagi desa merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyatama dan Novita (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern aparaturnya mempengaruhi akuntabilitas dana desa (ADD). Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan merupakan faktor penting, disebabkan dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut. Prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diterapkan dengan baik, apabila didukung oleh sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Penelitian Aulia (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa alokasi dana desa harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan pemerintah yang berlaku. Namun, dalam penggunaan alokasi dana desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sistem pengendalian internal yang baik diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan

tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Friyani, R. (2017) dan Nahuddin, Y. (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Atmadja.

A., & Saputra, A. (2017) yang di lakukan di Negara Burma, menunjukan bahwa kegiatan pengendalian internal dan transparasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah. Karena pemerintah negara Burma melalui Kementerian Urusan Pemerintah Daerah belum meninjau secara mendalam mengenai kebijakan dan prosedur kegiatan pengendalian internal melalui reformasi untuk memperkuat efektivitas akuntabilitas keuangan dan transparansi bidang pemerintah daerah di negara bagian.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) yang meneliti tentang pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Peran Organisasi Pemerintah Desa, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kabupaten Brebes. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan semua variabel yang ada serta metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah Pertama Menambahkan variabel sistem pengendalian internal karena dengan penggunaan sistem pengendalian internal diharapkan mampu memperbaiki kualitas penyusunan administrasi pengelolaan dana desa sehingga dapat menghindari keterlambatan pencairan dana desa periode berikutnya. Selain itu, pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa bias lebih dioptimalkan. Sistem pengendalian internal yang baik dapat

mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian dana desa. Penambahan variabel sistem pengendalian internal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widyatama dan Novita (2017) yang menyatakan semakin baik pengendalian internal maka semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.

Kedua objek penelitian ini adalah desa Pagejungan kecamatan Brebes karena adanya permasalahan kurangnya kompetensi sumber daya dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang rata-rata hanya lulusan SMA dan sudah tua menjadi penyebab keterlambatan pencairan dana desa. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal sehingga masih terdapat kelemahan dalam implementasi pelaporan keuangan desa dan memicu ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa telah banyak meningkatkan diberbagai aspek, namun hanya sebagian masyarakat yang aktif terhadap kegiatan/program desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa, sehingga inisiatif masyarakat dalam menyampaikan ide-ide strategis belum sepenuhnya terpenuhi.

Penelitian Arsjad M.F (2018) menyatakan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa. Konsep kemampuan dalam suatu organisasi pemerintahan desa memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengalaman terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat desa. Konsep lain yaitu konsep administrasi pemerintahan desa. Sadu Wasistiono mengatakan

bahwa tanpa adanya pemerintahan desa yang kuat, desa dengan masyarakat hanya akan menjadi obyek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya. Dalam peranan pemerintah desa sebagai struktur perantara adalah masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat diluar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana peran organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh peran organisasi pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:



#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas dana desa.
- b. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas dana desa bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui akuntabilitas dana desa. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pemerintah desa dan pengelolaan akuntabilitas dana desa sekaligus sumber bahan baru dalam Pembelajaran Pendidikan

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer yang tidak termotivasi. Menurut Donaldson & Davis (1991), teori stewardship adalah teori yang oleh tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang para eksekutif dalam perusahaan atau organisasi sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai keinginan pemerintah pusat dan masyarakat. Teori stewardship mengasumsikan bahwa adanya hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, yang menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi. Teori stewardship lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa (steward) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat

dibandingkan). Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan kompetensi aparat pengelola dana desa yang memadai. Wujud dari akuntabilitas yang diciptakan pemerintah desa menimbulkan responsiveness kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memberikan tanggapan atau masukan dalam meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya.

Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat terwujud dengan adanya kontrol baik sehingga menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Teori ini juga mengharapkan komitmen organisasi yang berada didalam perusahaan lebih menjunjung tujuan perusahaan dibandingkan dengan tujuan perorangan agar mencapai sasaran. Kesadaran agar aparatur yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan melakukan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih baik. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat, sehingga aparatur akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai steward untuk memberikan pelayanan kepada publik.

### **2.1.2 Pemerintah Desa**

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha- usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rosyidi, 2018). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan

desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### **2.1.3 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara. Keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat

pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber - sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.
2. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

#### **2.1.4 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi

kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan hingga realisasi atau pelaksanaan (Nahuddin, 2018). Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki entitas, baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholders.

#### **2.1.5 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa**

Perangkat desa ialah aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. Perangkat desa merupakan salah satu unsur pemerintah desa. Sebagai salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa. Sumber daya manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang terdapat dalam diri manusia, dimana hal tersebut dapat didaya gunakan oleh organisasi (Indrianasari, 2017). Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah. Kompetensi aparatur desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal. Sebagai syarat



untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu maka ia harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya.

#### **2.1.6 Peran Organisasi Pemerintah Desa**

Menurut Sopiah (2008), peran organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. organisasi merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi. peran organisasi adalah keinginan anggota organisasi untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi.

#### **2.1.7 Sistem Pengendalian Internal**

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik, pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Menurut PP No. 60 tahun 2008 yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

**Gambar 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (th)	Objek peneliti & thn peneliti	variabel	Hasil
1	Arsjad, M.F (2018)	Desa Karyamukti kecamatan Mutilango kabupaten Gorontalo (2016)	X : Peranan Aparat Desa Y : Pelaksanaan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Peranan Aparat Desa berpengaruh positif dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa
2	Atmadja., A & Saputra, A (2017)	Desa di kabupaten Buleleng (2015)	X : Pencegahan Fraud Y : Pengelolaan Keuangan Desa	Pencegahan fraud berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3	Muhlin.M (2019)	Desa di kecamatan Balantak Utara kabupaten Banggai (2017)	X <sub>1</sub> : Model Pendamping Desa X <sub>2</sub> : Tata Kelola Pemerintahan	Model pendamping desa berpengaruh negatife dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, Tata kelola

No	Peneliti (th)	Objek peneliti & thn peneliti	variabel	Hasil
			Y : Pemberdayaan Masyarakat	pemerintahan pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa
4	Widyatama & Novita (2017)	Desa di Pulau Bangka Belitung (2016)	X <sub>1</sub> : Pengaruh Kompetensi  X <sub>2</sub> : sistem pengendalian internal  X <sub>3</sub> : akuntabilitas pemerintah desa  Y : aplikasi dana desa	Pengaruh kompetensi sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap aplikasi dana desa  Akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh positif terhadap aplikasi dana desa
5	Friyani R (2017)	Desa di kota Jambi (2015)	X <sub>1</sub> : Pengaruh Desentralisasi Fiskal  X <sub>2</sub> : Good Governanc dan  X <sub>3</sub> : Standar Akuntansi Pemerintah  Y : Akuntabilitas Keuangan	Pengaruh desentralisasi fiskal berpengaruh negative terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa  Good governance berpengaruh negative terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa  Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
6	Puspita D (2018)	Desa di Banyuwangi (2015)	X : Pelaporan Keuangan Desa  Y : Inovasi Sistem E-Village Budgeting	Pelaporan Keuangan Desa yang berpengaruh positif pada Inovasi Sistem E-Village Budgeting
7	Nahuddin.Y	Desa di provinsi	X <sub>1</sub> :	Akuntabilitas keuangan

No	Peneliti (th)	Objek peneliti & thn peneliti	variabel	Hasil
	(2018)	Jawa Timur (2015)	Akuntabilitas keuangan desa  X <sub>2</sub> : Kesejahteraan aparatur desa  Y : Pengelolaan keuangan desa	desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa Kesejahteraan aparatur desa juga berpengaruh positif dalam pengelolaan keuangan dana desa
8	Aulia (2018)	Desa di kecamatan Harau, kecamatan Pangkalan Koto Baru, kecamatan Kapur IX (2015)	X <sub>1</sub> : Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa X <sub>2</sub> : Komitmen Organisasi Pemerintah Desa X <sub>3</sub> : pemanfaatan Teknologi Informasi  Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparat dan komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa  Pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh negaife terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sumber: berbagai jurnal, dirangkum oleh peneliti

## 2.2 Perumusan Hipotesis

### 1. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana terhadap Akuntabilitas

#### Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi aparat pengelola dana desa merupakan suatu keahlian mutlak yang diperlukan aparatur desa agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal

(Arsjad, 2018). Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai *steward* harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan dana desa, terlebih jumlah dana desa yang diterima desa selalu meningkat setiap tahun dan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya dari faktor sumber daya manusia (Dewi dan Gayatri, 2019).

Kompetensi berpengaruh positif pada pengelolaan laporan keuangan dana desa. Aparat yang kompeten akan menghasilkan output yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Sejalan dengan teori *stewardship*, aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang diharapkan.

Penelitian Atmadja & Saputra, (2017), menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti bahwa semakin kompeten aparat pengelola dana desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Dengan berperanya perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan berkualitas baik dan transparan. Didukung oleh penelitian yang dilakukan Arsjad (2018), Muhlin. M (2019) yang menyatakan bahwa semakin banyak aparatur desa yang memiliki kompetensi didalam bidangnya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana desa. Kompetensi yang

memadai dari perangkat desa dapat meningkatkan akuntabilitas yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah desa dalam menerapkan mekanisme kontrolnya. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H1 : Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

## **2. Pengaruh Peran Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

Organisasi adalah suatu fenomena yang berhubungan perilaku kewarganegaraan, prestasi dan produktivitas. Adanya peran organisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana desa sehingga mampu melaksanakan program kegiatan dengan baik. Peran organisasi merupakan alat psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan. Semakin baik kerja organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang akuntabel dan transparan adalah peran aparatur karena inti dari suatu pemerintah tercermin dalam keterikatan dan loyalitas seorang pegawai kepada organisasinya yang akan mendorong mereka untuk selalu bekerja dalam berbagai situasi.

Pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan aparatur dengan tujuan melayani publik harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Pertanggungjawaban ini merupakan wujud dari akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan teori stewardship, aparatur pengelola dana desa harus memiliki



komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban sebuah organisasi atau institusi adalah memberikan pertanggungjawaban dari segala aktivitas dalam mengelola anggaran yang secara langsung pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh aparatur sebagai penggerak organisasi. Prinsip organisasi juga ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Penelitian Aulia(2018) yang menyatakan bahwa organisasi dibentuk karena berperan serta berkomitmen untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengelola sumber daya atau anggaran yang telah disediakan oleh masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan terwujud dengan komitmen organisasi pemerintah desa yang baik, dikarenakan aparatur yang terdapat didalam organisasi atau institusi memiliki rasa keterlibatan dan kepuasan hidup dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Penyelarasan tujuan organisasi dan aparatur dapat terwujud dengan komitmen organisasi yang tinggi. Didukung dengan penelitian Aulia (2018) mengemukakan bahwa peran organisasi merupakan salah satu factor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Peran Organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

### **3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik . Penyelenggaraan kegiatan dalam suatu pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian internal ( Aulia 2018).

Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan merupakan faktor yang penting, karena dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa, sehingga berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut. Sebagai steward pemerintah desa dapat mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian internal agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penelitian Arsjad (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian aparatur dari pemerintah desa memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, karena pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas

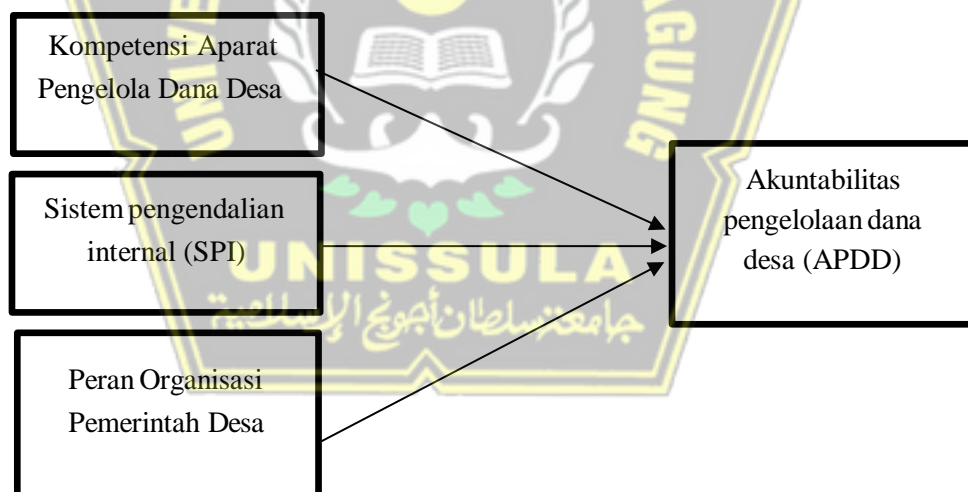
keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan. Didukung oleh Widyatama dan Novita (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

### 2.3 Kerangka Penelitian

**Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Peran Organisasi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**



Gambar 2 1. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

(Sumber Gambar: Data penelitian yang diolah, 2023)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, serta bertujuan menguji hipotesis yang ada menurut Sugiyono (2013). Menurut Sugiyono (2017), metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *eksplanatori (explanatory research)*. Menurut Sugiyono (2017), *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Alasan utama peneliti ini menggunakan metode penelitian *explanatory* ialah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan terikat yang ada di dalam hipotesis.

## **3.2 Populasi dan Sampel**

### **3.2.1 Populasi Penelitian**

Populasi dapat didefinisikan sebagai himpunan atau sekumpulan elemen, unsur atau unit dalam suatu kawasan atau ruang lingkup tertentu yang memiliki atribut atau karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti sebagai objek analisis penelitian (Wahyudin, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Pagejungan di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

### **3.2.2 Sampel Penelitian**

Sampel adalah cuplikan yang diambil dari populasi dan menjadi wakil populasi (Wahyudin, 2015). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara purposive sampling. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesra, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan dan kepala dusun.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

## **3.3 Sumber dan Jenis Data**

### **3.3.1 Sumber Data Penelitian**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer data berupa opini subjek (orang) secara

individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berhubungan dengan penelitian Sugiyono (2017).

### 3.3.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode yang dipilih yaitu metode pendekatan kuantitatif yaitu memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan Friyani (2017).

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung diserahkan kepada kriteria responden di desa Pagejungan Kecamatan Brebes. Kuesioner yang telah diisi oleh responden diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti ini memilih cara demikian dengan pengembangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi resiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

### 3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

**Tabel 3. 1 Tabel Penelitian Definisi Operasional**

Variabel	Definisi konsep	Pengukuran	Sumber
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa adalah hal mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan ketrampilan serta perilaku untuk mendorong	indicator : 1. PengetahuanKemampuan untuk meningkatkan pengetahuan 2. Keahlian teknis 3. Kemampuan mencari solusi 4. Inisiatif dalam bekerja 5. Keramahan dan kesopanan	Aulia (2018)



Variabel	Definisi konsep	Pengukuran	Sumber
	pembangunan desa yang optimal.		
Peran Organisasi Pemerintah Desa	Peran Organisasi adalah Orientasi individu terhadap kerja yang menunjukkan bahwa individu selalu memikirkan pekerjaan, dimana pekerjaan ini memberikan kepuasan hidup dan status bagi kehidupan di pemerintahan desa, (Aulia 2018).	indicator : 1.Keyakinan terhadap tujuan organisasi 2.Perasaan memiliki organisas 3.Mempertahankan keanggotaan organisasi 4.kesetiaan dalam organisasi 5.Kesediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi	Aulia (2018)
Sistem Pengendalian Internal	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan (Widyatama & Novita 2017)	indicator : 1.Lingkungan pengendalian 2.Penilaian resiko 3.kegiatan pengendalian 4.informasi dan komunikasi 5.pemantauan pengendalian intern.	Widyatama & Novita (2017)
Akuntabilitas Dana Desa	Kewajiban yang dimiliki oleh individu yang diamanati mengelola sumber daya dengan cara mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja individu, badan	inndikator: 1.Kejujuran dan keterbukaan informasi 2.Kepatuhan dalam pelaporan 3.Kesesuain prosedur 4.Kecukupan	Nahuddin Y (2018)

Variabel	Definisi konsep	Pengukuran	Sumber
	hokum, maupun pemimpin kepada yang memiliki hak untuk mempertanggungjawab dan keterangan	informasi 5.Ketetapan penyampaian laporan	

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Skala Likert**

Alternatif Jawaban	Penjelasan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

(Sumber Tabel: Sugiyono, 2013)

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan kemampuan sebuah skala untuk mengukur konsep yang dimaksudkan. Manfaat dari uji validitas yaitu untuk mengetahui apakah item-item yang ada dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis faktor dengan bantuan SPSS, dimana taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 5%. Untuk mengetahui suatu kuesioner dapat dikatakan valid maka nilai  $r$  hitung  $r \geq$  tabel, dan jika  $r$  hitung  $\leq$   $r$  tabel maka item dinyatakan tidak valid (Bahri, 2018). Uji validitas terhadap instrumen digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan tersebut dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian instrumen Akuntabilitas Pengelola Dana Desa (Y) Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

(X1), Peran Organisasi Pemerintah Desa (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3) menggunakan analisis *korelasi product moment person* dengan bantuan SPSS.

Uji reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh alat tersebut dapat dipercaya. Kepastian data yang telah diukur secara tepat serta tidak terdapat kesalahan material melalui data yang diukur, proses pengukuran. Penelitian ini, menggunakan program SPSS untuk mengukur reliabilitas. Butir kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach Alpha*  $> 0,700$ .

Jika nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya akan semakin terpercaya untuk masing-masing variabel (Ghozali, 2016).

### 3.6.2 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mentransformasikan data-data penelitian yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel, sehingga mudah mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Menurut Ghozali (2016) analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi seperti maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, dan *median* dari variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yaitu pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Statistik deskriptif merupakan bentuk penyajian berbagai ukuran angka yang sangat penting bagi sampel penelitian. Tujuannya adalah memudahkan untuk memahami variabel yang digunakan dalam penelitian.

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi apakah model OLS menghasilkan estimator yang BLUE (*best linier unbiased estimator*), sehingga tidak

ada gangguan dalam OLS seperti pada masalah multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan masalah autikorelasi sehingga uji T dan uji F menjadi valid.

### 3.6.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Jika suatu variabel tidak berdistribusi normal, maka hasil uji statistik akan menurun. Pada uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Pada tabel Statistik *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan syarat jika nilai signifikansinya di atas 5% atau 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya.

### 3.6.3.2 Linearitas

Menurut Ghozali (2016) Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah model yang digunakan sudah benar atau belum. Uji linearitas dilihat pada output IBM SPSS *Statistic 25* pada kolom *deviaton from linearity* pada tabel ANOVA. Variabel dikatakan mempunyai hubungan linear apabila signifikansi  $> 0,05$  maka hubungan antar variabel adalah liner dan sebaliknya.

### 3.6.3.3 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance* melalui program IBM SPSS. Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai *VIF*  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi dan sebaliknya.

### 3.6.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji model regresi apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. (Ghozali, 2016). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain terlihat tetap disebut *homoskedastisitas* dan jika berbeda *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik disebut *homoskedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Untuk mengetahui hasil penelitian dengan menggunakan uji *scatterplot* melalui program IBM SPSS *Statistic 25*. Dasar analisisnya adalah output regresi yang fokus pada *chart scatterplot*. Dikatakan tidak terjadi *heteroskedastisitas* apabila data menyebar dan tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja dan tidak menunjukkan pola tertentu.

### 3.6.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Arikunto (2010) Regresi berganda merupakan salah satu bentuk teknik regresi jika terdapat lebih dari satu variabel bebas untuk melakukan prediksi hubungan terhadap variabel terikat. Penelitian ini berusaha menganalisis ketergantungan variabel terikat kepatuhan wajib pajak dengan variabel bebas yaitu pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.

Bentuk persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas pengelolaan dana desa

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  : Koefisien regresi variabel Kompetensi Aparat Dana Desa

$\beta_2$  : Koefisien regresi variabel Peran Organisasi Pemerintah Desa

$\beta_3$  : Koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal

X1 : Kompetensi Aparat Dana Desa

X2 : Peran Organisasi Pemerintah Desa

X3 : Sistem Pengendalian Internal

e : *error*

### **3.6.5 Uji Goodness of Fit**

#### **3.6.5.1 Uji Simultan (Uji F)**

Menurut Ghozali (2016) Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan nilai F tabel dengan F hitung yang terdapat pada tabel *Analysis of variance*. Untuk menentukan nilai F tabel, dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%, kriteria yang digunakan adalah:

1. Jika F hitung  $<$  F tabel, maka  $H_0$  diterima. Artinya secara statistik dapat dibuktikan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika F hitung  $>$  F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya secara simultan dapat dibuktikan bahwa semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

#### **3.6.5.2 Uji Koefisien Determinasi Simultan ( $R^2$ )**

Ghozali (2016) menyatakan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan adalah antara 0 dan 1. Semakin besar nilai ( $R^2$ ) maka semakin



besar kemampuan variabel dependen, begitu pula sebaliknya. Kontribusi dari masing-masing variabel dilihat dari kuadrat koefisien parsialnya

### 3.6.5.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2016), Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil  $H_a$  diterima jika  $t$  hitung  $>$  dari  $t$  tabel dan  $H_0$  ditolak, sebaliknya hasil  $H_a$  ditolak jika  $t$  hitung  $<$  dari  $t$  tabel dan  $H_0$  diterima. Jika hasil dari tingkat signifikan  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima. Hasil tersebut berarti bahwa variabel independen dapat menerangkan variabel dependen.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Desakripsi Sampel Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sejumlah perangkat yang bekerja dikantor Balaidesa, Desa Pagejungan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *proporsional random sampling*. Sampel yang diberikan berbentuk kuesioner sejumlah 50 yang disebar kepada perangkat desa secara langsung. Responden mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan maupun pernyataan yang diberikan oleh peneliti.

Hasil penyebar kuesioner telah dilakukan, diperoleh data yang terlihat pada tabel 4.1 berikut menunjukkan secara singkat mengenai jumlah dan tingkat pengambilan kuesioner yang dijawab oleh responden.

**Tabel 4. 1 Hasil Penyebaran Kuesioner**

Jumlah kuesioner	50
Bukan merupakan perangkat desa	12
Masa kerja minimal satu tahun	18
Sampel yang digunakan	30

(Sumber Tabel: Data penelitian yang diolah tahun 2023)

Berdasarkan distribusi pada tabel 4.1. menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 50 lembar, dimana 20 kuesioner tidak memenuhi syarat karena pelaku perangkat desa tidak mengetahui maksud dari kuesioner tersebut. Sedangkan 30 kuesioner yang diisi secara lengkap dan memenuhi syarat dapat diolah.

#### 4.1.1 Deskripsi Identitas Responden

Responden dipilih menggunakan rumus slovin dan didapatkan nilai 30, sehingga responden yang digunakan sebanyak 30. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah para perangkat desa didesa Pagejungan Kabupaten Brebes. Hasil data yang diperoleh mengenai responden adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki – Laki	18	60
2	Perempuan	12	40
	Jumlah	30	100

(Sumber Tabel: Data penelitian yang diolah tahun 2023)

Menurut tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan dari 30 responden yang telah diberikan kuesioner, jumlah responden didominasi oleh laki- laki sebanyak 18 responden dengan persentase 60%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak 12 responden dengan persentase 40%.

**Tabel 4.3 Identifikasi Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	18 – 22 Tahun	5	17
2	23 – 40 Tahun	10	33
3	41 – 50 Tahun	12	40
4	51 – 60 Tahun	3	10
	Jumlah	30	100

(Sumber Tabel: Data penelitian yang diolah tahun 2023)

Berdasarkan table 4.3 di atas bahwa 30 responden yang telah diberikan kuesioner, usia responden terbanyak pada rentang 41-50 tahun berjumlah 12 responden dan mempunyai persentase 40%, lalu usia rentang 23-40 tahun berjumlah 10 responden dan mempunyai persentase 33%, selanjutnya dengan usia rentang 18-22 tahun berjumlah 5 dan mempunyai persentase 17% diakhiri dengan usia 51 – 60 tahun berjumlah 3 responden dan mempunyai persentase 10%

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Uji Validitas dan Reabilitas

#### 4.2.1.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis faktor dengan bantuan IBM SPSS *Statistic 25*, dengan taraf signifikansi 5%. Pertanyaan dikatakan valid jika nilai  $r$  hitung  $\geq r$  tabel, dan sebaliknya (Bahri, 2018).

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) Pengaruh Kompetensi Aparat Dana Desa (X1), Peran Organisasi Pemerintah Desa (X2) dan Sistem Pengendalian Internal (X3) menggunakan analisis korelasi *product moment person* dengan bantuan IBM SPSS *Statistic 25*. Uji coba kuesioner dilakukan terhadap 30 responden yang terdiri dari perangkat desa Pagejungan Kabupaten Brebes. Berikut adalah hasil uji validitas :

**Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparatur**

No	Indikator Variabel Penelitian	R hitung	R tabel	Keterangan
1.	<b>Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola dana desa</b>			
	1. Memahami tentang pengetahuan guna meningkatkan semua pengetahuan dana desa	0.795	0.316	Valid
	2. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam mengelola dana desa	0.830	0.316	Valid
	3. Mampu mencari solusi jika terjadi masalah dalam pengelolaan dana desa	0.720	0.316	Valid
	4. Mempunyai inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada	0.587	0.316	Valid
	5. Bekerja dengan mengedepankan	0.049	0.316	Valid

	etika dan kode etik sebagai pegawai			
2	<b>Peran Organisasi Pemerintah Desa</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yakin terhadap semua tujuan organisasi yang dibuat desa</li> <li>2. Wajib memiliki perasaan yang baik terhadap organisasi desa</li> <li>3. Adanya sistem organisasi yang mengharuskan setiap anggotanya bisa bertahan dalam situasi apapun</li> <li>4. Adanya rasa kesetiaan dalam berorganisasi oleh semua anggotanya</li> <li>5. Harus bersedia mengerahkan segala upaya agar berjalan baik atas nama organisasi</li> </ol>	0.567 0.468 0.717 0.833 0.742	0.316 0.316 0.316 0.316 0.316	Valid Valid Valid Valid Valid
3	<b>Sistem Pengendalian Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah desa mengetahui lingkungan pengendalian internal sudah baik dalam keperluan APBD</li> <li>2. Aparat desa siap menanggung semua penilaian risiko yang akan terjadi apabila ada hal yang tidak diinginkan</li> <li>3. Semua kegiatan pengendalian sudah menjadi hak bagi setiap aparat yang bertugas</li> <li>4. Apabila ada informasi penting aparat harus saling berkomunikasi satu sama lain</li> <li>5. Pihak desa wajib memantau setiap pengendalian internal aparat desa</li> </ol>	0.777 0.759 0.578 0.438 0.572	0.316 0.316 0.316 0.316 0.316	Valid Valid Valid Valid Valid
4	<b>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua pengeluaran dan penerimaan desa kami dilaksanakan secara terbuka &amp; jujur sehingga masyarakat bisa tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa</li> <li>2. Pemerintah desa sudah berkepatuhan dalam melakukan pelaporan keuangan desa setiap saat</li> <li>3. Pemerintah desa telah mengikuti prosedur pelaksanaan pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa secara lengkap</li> </ol>	0.703 0.751 0.778	0.316 0.316 0.316	Valid Valid Valid

4. Warga desa akan selalu mempunyai cukup informasi apa yang pemerintah desa kerjakan	0.862	0.316	Valid
5. Pemerintah desa berketetapan untuk melakukan semua kegiatan yang ada didesa menggunakan dana desa	0.787	0.316	Valid

Berdasarkan Tabel 4.4. diperoleh data uji validitas variabel Kompetensi Aparatur Desa, Peran Organisasi Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa bahwa dari 20 butir pertanyaan yang ada, semuanya ditanyakan valid. Sehingga, jumlah keseluruhan rhitung>rtabel (0.316). Berdasarkan uji validitas kepatuhan wajib pajak terdapat 20 butir pertanyaan yang dapat digunakan dan dianggap layak untuk dibagikan kepada responden penelitian.

Berdasarkan uji validitas pemahaman pengelola dana desa terdapat 20 butir pertanyaan yang dapat digunakan dan dianggap layak untuk diberikan kepada responden penelitian.

#### 4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan keusioner yang digunakan untuk mengumpulkan data reliabel atau tidak. Kepastian data yang telah diukur secara tepat serta tidak terdapat kesalahan material melalui data yang diukur, proses pengukuran. Penelitian ini, menggunakan program SPSS untuk mengukur reliabilitas. Butir kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach Alpha* > 0,700. Jika nilai alphanya mendekati angka satu maka nilai reliabilitas datanya akan semakin terpercaya untuk setiap variabel (Ghozali, 2018).

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel**



No	Variabel	Cronbach Alpha	Batas >0.700	Keterangan
1	Kompetensi Aparatur Desa	0.730	0.700	Reliabel
2	Peran Organisasi Desa	0.797	0.700	Reliabel
3	Sistem Pengendalian Internal	0.731	0.700	Reliabel
4	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.831	0.700	Reliabel

(Sumber Tabel: Data penelitian yang diolah tahun 2023)

## Uji Asumsi Klasik

### 4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Jika suatu variabel tidak berdistribusi normal, maka hasil uji statistik akan menurun dan sebaliknya. Pada uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Pada tabel Statistik *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan syarat jika nilai signifikansinya di atas 10% atau 0,1, maka data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya, dan berarti sebaliknya pada tabel 4.10:

**Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S)**

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X01	X02	X03	Y
N		30	30	30	30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	19.53	20.57	20.30	20.20
	Std. Deviation	2.813	1.906	1.878	3.078
Most Extreme Differences	Absolute	.110	.217	.170	.148
	Positive	.109	.217	.130	.126
	Negative	-.110	-.216	-.170	-.148
Test Statistic		.110	.217	.170	.148
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>	.001 <sup>c</sup>	.027 <sup>c</sup>	.091 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25 (2023))

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogrov Smirnov* diperoleh hasil *Asymp. Sig* pada kolom *Unstandardized Residual* sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal karena signifikansi yang diperoleh lebih  $>0,05$ .

Menurut Ghazali (2016) Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah model yang digunakan sudah benar atau belum. Uji linearitas dilihat pada output IBM SPSS *Statistic 25* pada kolom *deviaton from linearity* pada tabel ANOVA. Variabel dikatakan mempunyai hubungan linear apabila signifikansi  $> 0,05$  maka hubungan antar variabel adalah liner dan sebaliknya.

**Tabel 4. 7 Uji linieritas**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
akuntabilitas pengelolaan dana desa * sistem pengendalian internal	Between Groups	(Combined)	87.828	8	10.978	1.233	.329
		Linearity	39.044	1	39.044	4.385	.049
		Deviation from Linearity	48.783	7	6.969	.783	.609
	Within Groups		186.972	21	8.903		
	Total		274.800	29			

#### 4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas diukur menggunakan bantuan program IBM SPSS *Statistic 25*. Pada nilai *tolerance* dan lawannya atau menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai *VIF*  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.13 sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas**

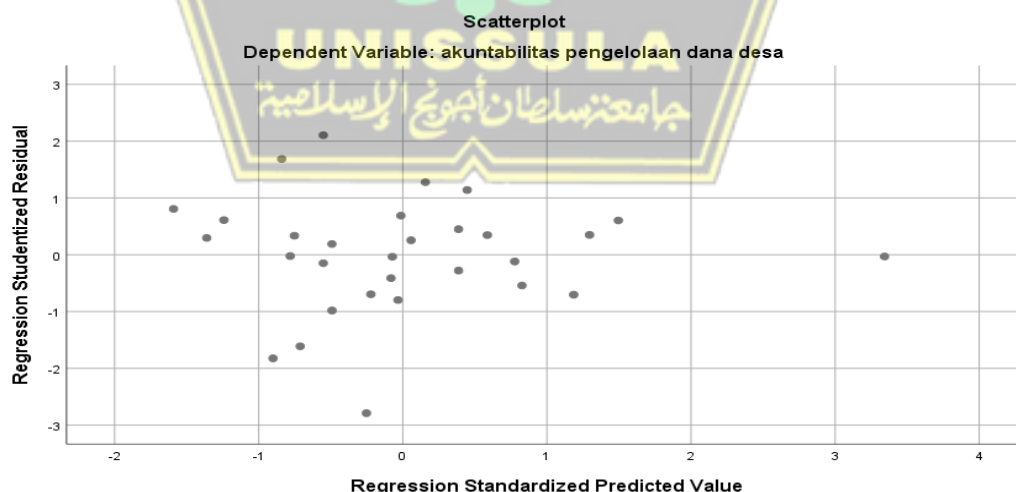
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
kompetensi aparat	.840	1.190
peran organisasi	.984	1.016
sistem pengendalian internal	.829	1.207

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25 (2023))

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas pada keempat variabel independen (X) dalam penelitian ini menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10, maka disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diukur menggunakan bantuan IBM SPSS *Statistic* 25. Penelitian ini menggunakan uji *scatterplot*. Dapat dilihat hasil uji melalui *chart scatterplot* pada output regresi yang dilakukan pada gambar 4.1 dibawah ini:

**Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

(Sumber Gambar: Output IBM SPSS 25 (2023))

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas, di

bawah dan di sekitar angka nol. Penyebaran titik-titik pada data tidak menunjukkan pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.2.3.4 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk meneliti bagaimana hubungan antara variabel bebas dan terikat. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat dan empat variabel bebas, sehingga regresi yang digunakan adalah regresi linier berganda. Untuk mengetahui bagaimana hubungan linier yang terjadi antara kompetensi aparat desa, peran organisasi desa, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Pagejungan kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Maka perlu diketahui persamaan garis regresinya. Hasil analisis regresi linier berganda menggunakan program IBM SPSS *Statistic* 25 diperoleh hasil dibawah ini:

**Tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	1.106	7.842	-.141	.889
	Kompetensi aparat desa(X1)	.087	.206	1.922	.676
	Peran Organisasi Desa(X2)	.451	.281	2.603	.121
	Sistem Pengendalian internal(X3)	.509	.311	2.035	.114

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25 (2023))

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh hasil koefisien regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.106 + .087X_1 + .451 X_2 - .509 X_3 + e$$

- 1) Konstanta = 1.106

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan konstanta sebesar 1.106.

Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai semua variabel bebas = 0 maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami kenaikan sebesar 1.106 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

- 2) Koefisien Kompetensi Aparat Desa ( $X_1$ ) = 0,087

Jika variabel independen lain nilainya tetap dan kompetensi aparat desa mengalami kenaikan satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,087. Koefisien bernilai positif artinya terdapat hubungan positif antara pemahaman kompetensi aparat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin tinggi kompetensi aparat desa maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

- 3) Koefisien Peran Organisasi Desa ( $X_2$ ) = 0,451

Jika variabel independen lain nilainya tetap dan peran organisasi desa mengalami kenaikan satu-satuan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,451. Koefisien bernilai positif artinya terdapat hubungan positif antara peran organisasi desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin tinggi peran organisasi desa maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

- 4) Koefisien Sistem Pengendalian Internal ( $X_3$ ) = 0,509

Jika variabel independen lain nilainya tetap dan sistem pengendalian internal mengalami kenaikan satu-satuan maka sistem pengendalian internal akan mengalami kenaikan sebesar 0,509. Koefisien bernilai positif artinya terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin tinggi sistem pengendalian internal maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 4.2.2 Uji Goodness of Fit

### 4.2.4.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan perbandingan antara nilai F tabel dengan F hitung yang terdapat pada tabel *analysis of variance*. Hasil output uji simultan (Uji F) dapat dilihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61.467	3	20.489	3.497	.082 <sup>b</sup>
	Residual	213.333	26	8.205		
	Total	274.800	29			

a. Dependent Variable: akuntabilitas pengelolaan dana desa

b. Predictors: (Constant), sistem pengendalian internal, peran organisasi desa, Kompetensi aparat desa

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25 (2023))

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh hasil dari tingkat signifikansi pada kolom Anova lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu sebesar  $0,082 < 0,05$  dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu  $3,497 > 2,97$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparat desa, peran organisasi desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga hipotesis diterima.

#### 4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi Simultan ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kompetensi aparat desa, peran organisasi desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Pagejungan di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate



1	.473 <sup>a</sup>	.224	.534	2.864
---	-------------------	------	------	-------

a. Predictors: (Constant), sistem pengendalian internal, peran organisasi desa, Kompetensi aparat desa

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25 (2023))

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,534 dapat diartikan bahwa kompetensi aparat desa, peran organisasi desa, sistem pengendalian internal, terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 53,4% (0,534 x 100%) dan sisanya sebesar 46,6% (100% - 52,4%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model

#### 4.2.4.3 Uji Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial ini untuk menguji seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen yaitu variabel kompetensi aparat desa, peran organisasi desa, sistem pengendalian internal terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 4.16 berikut ini:

**Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-.141	.889
Kompetensi aparat desa(X1)	1.922	.676
Peran Organisasi Desa(X2)	2.603	.121
Sistem Pengendalian internal(X3)	2.035	.114

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25 (2023))

Berdasarkan Tabel 4.16 hasil uji parsial, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas dana desa nilainya sebesar 1,922 dengan nilai signifikansi 0,676. Sedangkan untuk nilai t tabel adalah 1,70 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Nilai t hitung diatas lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan

bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga hipotesis **diterima**.

2. Pengaruh peran organisasi desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa nilainya sebesar 2,603 dengan nilai signifikansi 0,121. Sedangkan untuk nilai t tabel adalah 1,70 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Nilai t hitung diatas lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peran organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga hipotesis **diterima**.
3. Pengaruh sistem pengendalian internal nilainya sebesar 2,035 dengan nilai signifikansi 0,114. Sedangkan untuk nilai t tabel adalah 1,70 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Nilai t hitung diatas lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga hipotesis **diterima**.

#### 4.3 Pembahasan

Ringkasan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.17 sebagai berikut :

**Tabel 4.13 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis**

H	Pernyataan	Sig	Hasil
H1	Kompetensi aparat dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	0,676	Diterima
H2	Peran organisasi desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	0,121	Diterima
H3	Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	0,114	Diterima

(Sumber Tabel: Data penelitian yang diolah, 2023)

##### 4.3.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan, pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa pemahaman pengaruh kompetensi aparat dana desa

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa di Kecamatan Brebes. Hal ini sesuai dengan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan uji signifikansi secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,676 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 yang berbunyi “terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh kompetensi aparat dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa” sehingga hipotesis tersebut **diterima**.

Hasil pengujian membuktikan bahwa pengaruh kompetensi aparat dana desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa di Kecamatan Brebes. Seperti pada anggota aparat desa di Kecamatan Brebes, pelaku aparatur desa sudah mempunyai pengetahuan tentang pemahaman kompetensi aparatur dana desa yang tinggi sehingga pada kenyataannya para aparatur dana desa menerapkan pemahaman tentang ketentuan dan tata cara pengelolaan akuntabilitas dana desa yang ada di Indonesia. Selain itu para aparatur desa juga mengetahui fungsi dari memahami ketentuan tentang pengelolaan dana desa sehingga menjadikan aparat desa patuh terhadap ketentuan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini sesuai dengan Dewi, Ni Komang dan Gayatri (2018) mengatakan bahwa pengaruh kompetensi aparat dana desa menandakan jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan Dana Desa maka secara otomatis aparatur dana desa dalam mengerjakan tugasnya mengelola akuntabilitas dana desa akan meningkat. Sehingga jika aparatur sudah memiliki pemahaman Dana Desa yang baik maka tingkat kompetensi terhadap pengelolaan akuntabilitas dana desa pun akan tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan

Arifiyanto, Dwi dan Taufik (2014), Aulia P (2018) serta Husna, Saifatul dan Abdullah (2016) yang menyatakan bahwa pengaruh kompetensi aparat dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Suherwan dan Kamaliah (2018) dan Naimah (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman apatarur dana desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemahaman mengenai dana desa seperti mengetahui ketentuan dan tata cara dana desa serta penerapan sistem anggaran dana desa dan mengetahui fungsi dari pengelolaan anggaran dana desa harus tetap diperhatikan dan dipahami secara baik dan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar aparat dana desa termotivasi untuk melakukan penggunaan dana desa dengan baik guna kepentingan dan kebutuhan desa sendiri lebih baik.

#### **4.3.2 Pengaruh Peran Organisasi Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Merujuk pada *Theory Stewardship* pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh diri sendiri dan bisa berasal dari kesadaran yang dimiliki. Peran Organisasi Desa bagi seorang aparat desa merupakan hal yang penting sebagai penerapan dari memahami ketentuan Undang-undang mengenai pengelolaan dana desa. Aparat dana desa sudah mengetahui ketentuan anggaran dana desa dan melakukan kewajibannya menjadi aparat dana desa yang baik yang dapat dibuktikan dengan menghitung, melaporkan serta menggunakan anggaran desa. Sehingga berdasarkan observasi yang dilakukan akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah mengarah pada kegiatan dan keperluan bagi sebuah desa. Hal ini

menyebabkan Peran Organisasi Desa memiliki peran serta adanya manfaat bagi para anggota aparat dana desa di Kabupaten Brebes dalam hubungannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan, pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyebutkan bahwa peran organisasi desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Pagejungan Kecamatan Brebes. Hal ini sesuai dengan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan uji signifikansi secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,121 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 yang berbunyi “terdapat pengaruh positif dan signifikan peran organisasi desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa” sehingga hipotesis tersebut **diterima**. Hal ini berarti peran organisasi desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa di Kecamatan Brebes. Seperti pada aparat desa di desa kecamatan Brebes, aparat dana desa sudah memiliki sebuah organisasi desa dan mampu untuk mematuhi peraturan pengelolaan dana desa. Selain itu aparat dana desa juga sudah mengetahui peran-peran organisasi dari pengelolaan dana desa yang dijadikan pedoman untuk kesadarannya dalam mematuhi kewajibannya dalam mengelola dana desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut Perdana, Khaeril. (2018) peran organisasi desa merupakan kondisi dimana aparat desa mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pengelolaan dana desa kepada pemerintahan dimana peran organisasi dapat membantu aparat dana desa melakukan pengelolaan dana desa seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pengelolaannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Aulia P

(2018), Arifiyanto, Dwi dan Taufik (2014), Dwi dan Laila (2017) dan Husna, Saifatul dan Abdullah (2016) yang menyatakan bahwa peran organisasi desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan Wahyudin (2015) yang menyatakan bahwa peran organisasi desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran dari organisasi seperti mengetahui undang-undang dan kewajiban dana desa bagi aparat desa serta bagaimana cara mematuhi dengan menghitung, melaporkan dan mengelola dana desa.

#### **4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan, pengujian hipotesis keempat (H3) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pagejuran Brebes. Hal ini sesuai dengan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan uji signifikansi secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,114 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 yang berbunyi “terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa” sehingga hipotesis tersebut **diterima**. Hal ini berarti sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Pagejuran kecamatan Brebes.

Seperti para anggota aparat dana desa di Kecamatan Brebes. Aparatur desa sudah memiliki akuntabilitas pengelolaan dana desa di dorong oleh sistem



pengendalian internal yang tegas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Penerapan sistem pengendalian internal ini dapat mendorong aparat desa untuk mematuhi peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut (Yadnya, Yuniarta, & Sinarwati 2017) sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem aturan yang ada di desa guna menunjang pengelolaan dana desa. Sistem ini diterapkan melalui Undang-undang Negara dengan persetujuan bersama guna melakukan pengelolaan anggaran desa yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Aulia P (2018), Arifiyanto, Dwi dan Taufik (2014), serta Widyatama dan Novita (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Yudianto & Sugiarti (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memberikan peran penting guna memberikan pemahaman aparat desa agar tidak meremehkan adanya sistem pengendalian internal guna dapat mengelola anggaran desa. Sistem pengendalian internal ini dibuat agar dalam pengelolaan dana desa berjalan sesuai apa yang dibutuhkan desa

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Peran Organisasi Pemerintah Desa, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sampel yang diambil dengan menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 30 kuesioner yang dapat diolah. Hasil *Adjust R Square* menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Peran Organisasi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal menjelaskan Akuntabilitas Dana Desa sebesar 53,4% sedangkan sisanya 46,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, yang artinya model yang digunakan sudah baik. Sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Peran Organisasi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

#### 5.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Desa Pagejungan Kecamatan Brebes, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan kesemua objek mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Berdasarkan hasil *Adjust R Square*, bahwa variabel yang digunakan menjelaskan Akuntabilitas Dana Desa sebesar 53,4% sehingga masih terdapat

variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3. Berdasarkan uji validitas, semua variabel bersifat positif, sehingga indikator dari variabel yang digunakan semua bisa terorganisir dengan baik.

### 5.3 Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya sebuah desa yang lain yang ada di Kecamatan lain di Kabupaten Brebes sehingga dapat dijadikan generalisasi kesemua objek mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain, dengan contoh variabel seperti Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat.
  - a) Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi guna menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Sedangkan
  - b) Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi, yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dana desa seperti karakteristik pembangunan desa karena ada hubungan antara karakteristik pembangunan desa dengan akuntabilitas dana desa. Semakin desa itu maju maka semakin baik akuntabilitas dana desa, Riandani (2017). Indikator dan karakteristik pembangunan desa sebagai basis implementasi atas undang-

undang desa.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah dan memperbaiki pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner, serta melakukan uji *pilot test* sebelum melakukan penyebaran kuesioner. Sehingga kuesioner yang akan digunakan selanjutnya memiliki tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, S., Terhadap, P., Friyani, R., Pengajar, S., Ekonomi, F., & Jambi, U. (2014). *No Title*. 87–95.
- Atmadja, A. T., Adi, K., & Saputra, K. (2015). *Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia OF VILLAGE FINANCES. 1*, 7–16.
- Aulia P. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JOM FEB Riau University, Pekanbaru, Indonesia* , 1(3) ISSN 2239-0492
- Jefri, R., & Makassar, U. N. (n.d.). *Teori stewardship dan good governance*. 4(003), 14–28.
- Komitmen, P., Dalam, D. A. N. S., Purnamawati, I. G. A., Ketut, N., & Adnyani, S. (2019). *Peran komitmen, kompetensi, dan spiritualitas dalam pengelolaan dana desa*. 10(196), 227–240.
- Mei, N., Ekonomi, F., & Jember, U. (2018). Perbaikan Pelaporan Keuangan Desa Melalui Inovasi Sistem E-Village Budgeting Di Kabupaten. 12(2), 223–232.
- Nahuddin, Y. E. (2018). *Akuntabilitas Keuangan Desa dan Kesejahteraan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. 107–116.
- Pt, K., & Indonesia, C. D. (2016). *Peran komitmen organisasi sebagai variabel intervening antara kepuasan kerja dan organizational citizenship behavior (ocb) pada karyawan pt. coca-cola distribution indonesia, surabaya*. 4(2013), 1–10.
- Reward, P., Fasilitas, D. A. N., & Guru, K. (2018). *Economic Education Analysis Journal*. 7(2), 553–567.
- Setyowati, E., & Malang, U. B. (n.d.). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun ( Idm ): Studi Tiga Desa Di. 9(2), 170–188.
- Sosial, F. I., Politik, I., & Luwuk, U. T. (2014). *Model Pendamping Desa*. 39–54.
- Studi, P., Administrasi, I., & Gorontalo, U. (n.d.). *Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung:CV Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Widyatama, A., & Novita, L. (2017). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa ( ADD )*. 02(02), 1–20.

